

## Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa

**Priska Tambariki<sup>1</sup>, Frida Sumual<sup>2</sup>, Olviane Sumampouw<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: [priskatambariki@gmail.com](mailto:priskatambariki@gmail.com)

### Abstrak

Akuntansi Pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan yang ada agar setiap unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit-unit yang berada dibawah pengawasannya. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai mampu mendorong perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan/ hal itu dapat membantu pada penilaian kinerja dan proses penganggaran pusat pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntansi pertanggungjawaban dalam hubungannya sebagai alat pengendalian biaya. Metode analisis yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan anggaran yang disusun oleh kantor sudah cukup efektif karena melibatkan setiap bagian dalam penyusunan anggaran. Struktur organisasinya juga sudah berjalan dengan baik dimana masing-masing unit kerja sudah menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab sesuai aturan yang berlaku. Namun Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa belum melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali.

**Kata Kunci :** *Akuntansi Pertanggungjawaban; Anggaran; Pusat Pertanggungjawaban; Pengendalian Biaya; Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali*

### Abstract

This study aims to analyze the level of accountability and the application of transparency in village financial reporting in Kamanga Village, Tompasso District, Minahasa Regency in 2021 in terms of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The research method used is qualitative research where research seeks to determine and explain the activities carried out and the impact of the actions taken on their lives, with descriptive qualitative research, namely data in the form of categorized symptoms such as photos, documents, field notes. at the time the research was conducted. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis which aims to describe an object of research through data collected using information obtained directly from the field. The results of the study show that Kamanga Village, Tompasso District, Minahasa Regency in the village financial reporting process can be said to be accountable and transparent in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. However, in the village fund planning stage there is still a lack of community participation in the Village Development Planning Deliberation (MUSRENBANGDES) organized by the Kamanga Village Government.

**Keywords :** *Accountability; Transparency; Village Financial Report*

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah organisasi besar yang dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut terbagi menjadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program misalnya dinas-dinas. Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa merupakan salah satu contoh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut biasanya disebut dengan istilah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD adalah dasar perencanaan, pengendalian anggaran dan penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan.

Dalam konteks pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat (Sulastri, 2020). Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan juga sebagai alat pengendalian. Melalui akuntansi pertanggungjawaban setiap pengguna anggaran di masing-masing bidang melaporkan tanggungjawabnya. Dengan demikian, pimpinan dapat mengontrol dan mengawasi pengeluaran anggaran. Selain itu pengguna anggaran juga harus dilaporkan dan dibandingkan dengan anggaran yang telah di tentukan (Sulastri, 2020).

Tujuan penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa adalah untuk mengetahui besarnya dana yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Proses penganggaran mengacu pada rencana kegiatan kantor setiap kali dilakukan kegiatan dan merangkum semua di bagian keuangan dan pelaporan.

Dalam suatu instansi harus mempertanggungjawabkan semua biaya yang masuk dan keluar serta harus memperhatikan biaya terkendali dan tidak terkendali guna memperlancar proses pelaporan dan pertanggungjawaban setiap unit pertanggungjawaban menyusun rencana program dan anggaran untuk membuat laporan pertanggungjawaban guna mengetahui apakah pengendalian biaya telah berjalan dengan baik dan telah menggunakan biaya secara efisien (Haq, 2018).

Untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara baik, harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Kondisi pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa cukup kompleks. Salah satu kesulitan yang dialami pimpinan adalah dalam hal pengawasan dan pengendalian anggaran-anggaran atau biaya yang terjadi. Kesulitan dalam hal pengawasan dan pengendalian anggaran timbul karena belum adanya pengendalian biaya antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Akibatnya pusat pertanggungjawaban mengalami kesulitan dan penyimpangan dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu perlu ditetapkan akuntansi pertanggungjawaban yang baik dan benar.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda. Dalam penelitian terdahulu Muhammad (Yasit & Murniati, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada KUDSri Tanjung dinilai dari salah satu syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali belum berjalan dengan cukup baik. Efisiensi pengendalian biaya yang dilakukan oleh KUD Sri Tanjung berdasarkan laporan realisasi anggaran juga belum dikatakan efisien karena dalam penyusunan anggaran masih terdapat beberapa realisasi yang melebihi anggaran dan bahkan hampir disemua unit terdapat selisih yang tidak menguntungkan. Namun menurut penelitian terdahulu (Kiki Hardiyanti Danial, Firman Menne, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral menjalankan sistem Pertanggungjawaban anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah yang saling terkait dan masih berlaku.

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus oleh penulis adalah Bagaimana akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam hubungannya sebagai alat pengendalian biaya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*) merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan, serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban (Lubis & Ovami, 2020).

Dalam penyusunan laporan akuntansi pertanggung jawaban dibantu oleh divisi akuntansi, biaya dan anggaran yang melibatkan semua manajemen operasi (Wijayani, 2014). Tujuan dalam pelaporan pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi kepada manajer dan atasan mengenai pelaksanaan atau prestasi kerja dalam bidang-bidang yang di tanggungjawab dan mendorong para manajer dan atasan untuk mengambil tindakan langsung yang diperlukan guna memperbaiki prestasi kerja. Ada empat jenis pusat pertanggungjawaban yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi (Syafi'i, 2015). Indikator dalam akuntansi pertanggungjawaban (Aini, 2018), yaitu struktur organisasi, perencanaan dalam penganggaran, dan sistem akuntansi dan pelaporan.

Pusat pertanggungjawaban ialah suatu unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja atau organisasi yang dipimpinnya (Syafi'i, 2015).

Anggaran atau budget adalah perencanaan keuangan (perencanaan yang dinyatakan dalam satuan uang) secara menyeluruh untuk periode mendatang (biasanya untuk jangka waktu satu tahun), yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Dianti, 2015). Penyusunan anggaran dalam laporan akuntansi pertanggungjawaban harus dibuat disetiap pusat pertanggungjawaban yang ada, oleh karena itu, pada proses penyusunan anggaran, masing-masing bagian akan terlibat secara aktif untuk menyusun anggaran di bagian mereka (Tumbuan, 2013).

## **METODE**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Keuangan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena fenomena yang di teliti ini memerlukan prespektif dari semua pihak yang terlibat didalamnya. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam hubungannya sebagai alat pengendalian biaya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa jadi metode penelitian tersebut yang paling sesuai.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipakai peneliti untuk mempermudah kegiatannya dalam mengumpulkan data. Salah satu alat yang dipakai dalam penelitian ini adalah Handphone untuk membantu peneliti dalam merekam kejadian dalam bentuk dokumentasi/foto dan bisa dijadikan alat perekam pernyataan responden saat proses wawancara (Dan & Pengumpulan, 2013).

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara (Suliyanto, 2017). Penelitian ini memiliki 8 informan yaitu Bapak Tommy Wuwungan, S.Pd,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Wellem Debo Sakul selaku Bendahara Dinas Pendidikan, Bapak Ferry L.Tulung, S.Pd selaku Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan, Ibu Riska M. Solang, S.Pd selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bapak Meichel Sumaraw selaku Pegawai Dinas Pendidikan, Ibu Regina Gloria Lumintang, SE selaku Pegawai Dinas Pendidikan, Ibu Heydi Sumanti Mantouw selaku Pegawai Dinas Pendidikan, Bapak Miky Kumontoy selaku Pegawai Dinas Pendidikan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara formal terstruktur dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara formal atau sistematis untuk mendapatkan data tertentu dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subyek penelitian (Suliyanto, 2017). Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berasal dari artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang terkait dengan tema penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu langkah awalnya mengumpulkan data akuntansi pertanggungjawaban dari artikel ataupun jurnal-jurnal yang memiliki tema yang sesuai dengan penelitian ini kemudian dilakukan observasi dan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkaitan seperti staf kantor atau pimpinan yang bertanggung jawab atas akuntansi pertanggungjawaban.

Analisis Data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru (Raco, 2018). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan bagaimana Akuntansi Pertanggungjawaban di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Di dalam penelitian kualitatif, data yang diperlukan harus valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Teknik keabsahan data perlu dilakukan untuk memastikan upaya penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kredibilitas (credibility), dependabilitas (dependability) dan konfirmabilitas (confirmability) Hadi, (2017).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Perencanaan Anggaran**

Penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa tentang Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, peneliti melakukan wawancara dengan staf yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dan memperoleh hasil sebagai berikut. Peneliti menanyakan apa tujuan dari penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut informan 1 Bapak Tommy Wuwungan, S.Pd,MM (55 Tahun) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, menyatakan bahwa :

“Untuk mengetahui dana yang diperlukan masing-masing bagian dalam rangka membiayai kegiatan atau rencana kerja yang akan dilakukan dan juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana organisasi. Anggaran dapat digunakan sebagai standar dalam kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan dijadikan perbandingan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya yang ada di laporan pertanggungjawaban”

Peneliti menanyakan bagaimana proses penyusunan anggaran di Kantor Dinas Pendidikan mengikutsertakan partisipan unit-unit kerja? Menurut Informan 1 Bapak Tommy Wuwungan, S.Pd,MM (55 tahun), selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, menyatakan bahwa :

“Penyusunan anggaran disusun oleh setiap bagian dari kantor yang akan melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan kantor kemudian dilaporkan dibagian keuangan dan jika sudah disetujui oleh bendahara dilaporkan ke Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran”

Peneliti menanyakan apakah tiap pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban? Menurut Informan 1 Bapak Tommy Wuwungan, S.Pd,MM (55 tahun), selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, menyatakan bahwa :

“Setiap unit kerja yang melakukan kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui biaya yang dianggarkan dengan realisasinya”

Peneliti menanyakan bagaimana proses penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa apakah mengikutsertakan partisipan unit-unit kerja? Menurut informan 2 Bapak Wellem Debo Sakul (65 tahun) selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Proses penyusunan anggaran dilakukan oleh tiap unit kerja untuk mengetahui dana yang dibutuhkan masing-masing bagian dalam melaksanakan kegiatan kantor. Sistem perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan yaitu dari tiap bidang mengajukan semua surat pertanggungjawaban (SPJ) kemudian di verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) lalu diterima oleh bendahara jika sudah menyetujui perencanaan anggaran yang diajukan kembali dilaporkan ke PPK kemudian ke Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran”

Peneliti menanyakan apakah tiap pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban? Menurut informan 2 Bapak Wellem Debo Sakul (65 tahun) selaku bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Untuk setiap unit kerja yang melakukan kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban untuk dilakukan pengecekan realisasi biaya dengan anggaran yang ditetapkan”

Peneliti menanyakan bagaimana proses penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa apakah mengikutsertakan partisipan unit-unit kerja? Menurut informan 3 Bapak Ferry L. Tulung, S.Pd selaku Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan menyatakan bahwa :

“Setiap unit kerja yang ada terlibat dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan rencana kerja yang akan dilakukan. Tentunya mengikuti proses yang ada di kantor “

Peneliti menanyakan apakah tiap pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban? Menurut informan 3 Bapak Ferry L. Tulung, S.Pd selaku Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan menyatakan bahwa :

“Tiap unit kerja yang melakukan program kerja harus membuat laporan pertanggungjawaban dan dirangkum semua dibagian keuangan dan pelaporan. pelaporan pertanggungjawaban dilakukan setiap kali dilaksanakan kegiatan”

Peneliti menanyakan bagaimana proses penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa apakah mengikutsertakan partisipan unit-unit kerja? Menurut informan 4 Ibu Riska M, Solang S.Pd (34 tahun) selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa :

“Penyusunan anggaran dilakukan oleh setiap bidang berdasarkan pusat pertanggungjawaban”

Peneliti menanyakan apakah tiap pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban? Menurut informan 4 Ibu Risak M, Solang, S.Pd selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa :

“Setiap bagian yang melaksanakan kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi mengenai realisasi anggaran. Menurut informan 5 Bapak Meichel Sumarauw (43 tahun) selaku staf/pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa setiap unit kerja berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dengan demikian tiap unit kerja mempunyai tanggungjawab dengan anggaran yang mereka susun”

Peneliti menanyakan apakah tiap pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban? Menurut informan 5 Bapak Meichel Sumarauw selaku staf/pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Jika unit kerja tersebut melakukan kegiatan maka dari itu mereka juga harus membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bukti transaksi pelaksanaan kegiatan”

Peneliti menanyakan bagaimana proses penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa apakah mengikutsertakan partisipan unit-unit kerja? Menurut informan 6 Ibu Regina Gloria Lumintang, SE (28 tahun) selaku pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Proses penyusunan anggaran mengikutsertakan partisipan unit-unit kerja kemudian dilaporkan dibagian keuangan atau kepada bendahara kantor lalu disetujui oleh Kepala Dinas sebagai pimpinan dan penanggungjawab di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa”

Peneliti menanyakan apakah tiap pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban? Menurut informan 6 Ibu Regina Gloria Lumintang, SE selaku pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Setiap bidang membuat laporan pertanggungjawaban dan melaporkan laporan pertanggungjawaban di bagian keuangan”

Peneliti menanyakan bagaimana proses penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa apakah mengikutsertakan partisipan unit-unit kerja? Menurut informan 7 Ibu Heydi Sumanti Mantouw (34 tahun) selaku Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Proses penyusunan anggaran yang dilakukan di Dinas Pendidikan diawali dengan penyusunan anggaran di tiap bidang. Tiap bidang menyusun anggaran sesuai dengan rencana kerja apa yang akan dilakukan kemudian dilaporkan dibagian pusat

pertanggungjawaban. Agar kantor dapat mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan tiap-tiap bidang”

Peneliti menanyakan apakah tiap pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban? Menurut informan 7 Ibu Heydi Sumanti Mantouw selaku Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Setiap unit kerja yang membuat program kerja diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bukti dilaksanakan kegiatan atau program kerja”

Peneliti menanyakan bagaimana proses penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa apakah mengikutsertakan partisipan unit-unit kerja? Menurut informan 8 Bapak Miky Kumontoy (45 tahun) selaku Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa disusun oleh setiap unit kerja sesuai dengan kebutuhan kantor. Penyusunan anggaran tersebut dilakukan dari atasan kebawah. Jadi dari tiap bagian ikut serta dalam penyusunan anggaran kemudian dilaporkan di bagian keuangan untuk disesuaikan dengan keadaan yang ada di kantor”

Peneliti menanyakan apakah tiap pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban? Menurut informan 8 Bapak Miky Kumontoy selaku Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Setiap unit kerja yang melaksanakan program kerja harus ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bukti pelaksanaan kegiatan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa proses penyusunan anggaran telah mengikutsertakan partisipan unit-unit kerja dimana penyusunan anggaran dilakukan dari bawahan dan dilaporkan ke atasan. Setiap unit kerja yang melakukan kegiatan atau program kerja harus membuat laporan pertanggungjawaban untuk dilakukan pengecekan. Agar supaya jika dalam pelaporan pertanggungjawaban terdapat penyimpangan dapat diketahui dan dapat di pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi.

### **Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali**

Peneliti menanyakan apakah kantor memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali? Menurut Informan 1 Bapak Tommy Wuwungan, S.Pd,MM (55 tahun), selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, menyatakan bahwa :

“Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa tidak melakukan ppenggolongan biaya terkendali dan tidak terkendali”

Peneliti menanyakan kenapa tidak memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali? Menurut Informan 1 Bapak Tommy Wuwungan, S.Pd,MM (55 tahun), selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, menyatakan bahwa :

“Terjadinya biaya pada suatu bagian dipengaruhi oleh bagian lainnya. Biaya yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban adalah biaya yang menjadi tanggungjawab pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. pada dasarnya tidak ada biaya terkendali dan



tidak terkendali. Biaya yang tidak dikendalikan oleh seorang manajer dapat dikendalikan oleh manajer lainnya didalam suatu instansi. Setiap pusat pertanggungjawaban melakukan pencatatan biaya berdasarkan dokumen bukti seperti kwitansi, surat jalan (jika ada), nota-nota dan di kumpulkan menurut jenis biaya dan dibuat dalam laporan pertanggungjawaban berdasarkan realisasi anggaran yang terjadi”

Peneliti menanyakan apakah kantor memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali? Menurut informan 2 Bapak Wellem Debo Sakul selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa

“Dalam kegiatan operasionalnya tidak melakukan pemisahan biaya antara biaya terkendali dan tidak terkendali”

Peneliti menanyakan apakah kantor memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali? Menurut informan 3 Bapak Ferry L. Tulung, S.Pd selaku Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan menyatakan bahwa :

“Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa tidak melakukan pemisahan biaya antara biaya terkendali dan tidak terkendali”

Peneliti menanyakan apakah kantor memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali? Menurut informan 4 Ibu Risak M, Solang selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa :

“Dinas Pendidikan tidak memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali”

Peneliti menanyakan apakah kantor memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali? Menurut informan 5 Bapak Meichel Sumarauw selaku staf/pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa tidak melakukan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali”

Peneliti menanyakan apakah kantor memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali? Menurut informan 6 Ibu Regina Gloria Lumintang, SE selaku pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa belum melakukan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali dengan memadai”

Peneliti menanyakan apakah kantor memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali? Menurut informan 7 Ibu Heydi Sumanti Mantouw selaku Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Tidak ada pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa”

Peneliti menanyakan apakah kantor memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali? Menurut informan 8 Bapak Miky Kumontoy selaku Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :



“Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa tidak melakukan pemisahan biaya antara biaya terkendali dan tidak terkendali”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa belum memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali akibatnya pusat pertanggungjawaban mengalami kesulitan dan penyimpangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

### **Sistem Akuntansi dan Pelaporan**

#### **Laporan Pertanggungjawaban**

Penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa tentang Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, peneliti melakukan wawancara dengan staf yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dan memperoleh hasil sebagai berikut. Peneliti menanyakan apakah manfaat dari laporan akuntansi pertanggungjawaban? Menurut Informan 1 Bapak Tommy Wuwungan, S.Pd,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Untuk menghindari pemborosan ataupun kesulitan-kesulitan yang timbul pada waktu pelaksanaan kegiatan. Laporan kinerja tersebut merupakan hasil dari target yang dicapai yang telah dianggarkan dan hambatan-hambatan yang dialami setiap staf masing-masing pusat pertanggungjawaban”

Peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut informan 1 Bapak Tommy Wuwungan, S.Pd,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku didalam kantor, yaitu tiap unit kerja yang melaksanakan program kerja kantor kemudian dilaporkan dibagian keuangan”

Peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut informan 2 Bapak Wellem Debo Sakul selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Sistem pelaporannya dilakukan setiap bulan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan dan untuk alur pelaporannya sudah ada didalam aplikasi”

Peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 3: Bapak Ferry L.Tulung, S.Pd (55 Tahun), selaku Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban dibuat tiap kali dilaksanakan kegiatan sebagai pembuktian pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut kemudian dilaporkan dibagian keuangan”

Peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 4: Ibu Risak M. Solang, S.Pd (34 Tahun), selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawabannya dibuat dalam bentuk dokumen lalu diberikan dari tiap unit kerja dilaporkan di bagian keuangan untuk di laporkan menggunakan aplikasi Simda Keuangan”

Peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 5: Bapak Meichel Sumarauw (43 Tahun), selaku Staf/Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan laporan pertanggungjawaban dari tiap bidang yang melaksanakan program kerja kantor”

Peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 6 Ibu Regina Gloria Lumintang, SE (28 Tahun), selaku Staf/Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Sistem pelaporannya dilakukan setiap kali dilakukan kegiatan dan laporannya harus sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bukti untuk dilaporkan dibagian keuangan”

Peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 7: Ibu Heydi Sumanti Mantouw (34 Tahun), selaku Staf/Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban harus dibuat oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang ada oleh karena itu pada proses penyusunan anggaran, masing-masing bagian akan terlibat secara aktif untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban setelah melaksanakan kegiatan dan dilaporkan ke bagian keuangan”

Peneliti menanyakan bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 8: Bapak Miky Kumontoy (45 Tahun), selaku Seksi Tenaga Teknis SMP yang menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban melibatkan tiap bidang yang melaksanakan kegiatan dan dilaporkan dibagian keuangan dan kemudian dilaporkan ke kepala dinas untuk pembuktian pelaksanaan kegiatan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap unit kerja yang melakukan program kerja harus membuat laporan pertanggungjawaban dan di rangkum dan dilaporkan di bagian keuangan. Sistem pelaporannya dilakukan setiap bulan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan dan untuk alur pelaporannya sudah ada didalam aplikasi tersebut.

### **Akuntansi Pertanggungjawaban**

Penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa tentang Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, peneliti melakukan wawancara dengan staf yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dan memperoleh hasil sebagai berikut. Peneliti menanyakan bagaimana akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut informan 1 Bapak Tommy Wuwungan, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Peran akuntansi pertanggungjawaban di Kantor Dinas Pendidikan yaitu, menghasilkan laporan pertanggungjawaban, untuk melihat apakah anggaran yang direncanakan sesuai dengan realisasi anggaran yang terjadi. Dijadikan penilaian kerja pada setiap unit kerja”

Peneliti menanyakan bagaimana akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut informan 2 Bapak Wellem Debo Sakul selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa :

“Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di lingkup pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menggunakan penerapan akuntansi akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat atau disajikan dalam laporan pertanggungjawaban”

Peneliti menanyakan bagaimana akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 3: Bapak Ferry L.Tulung, S.Pd (55 Tahun), selaku Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan yang menyatakan :

“Peran akuntansi pertanggungjawabn di Kantor Dinas Pendidikan yaitu untuk memberikan informasi yang relevan mengenai perencanaan dan pengendalian dalam organisasi”

Peneliti menanyakan bagaimana akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 4: Ibu Risak M. Solang, S.Pd (34 Tahun), selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang menyatakan :

”Melalui akuntansi pertanggungjawaban, setiap pengguna anggaran di masing-masing bidang melaporkan tanggungjawabnya.dengan demikian, pimpinan dapat mengontrol dan mengawasi pengeluaran anggaran”

Peneliti menanyakan bagaimana akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 5: Bapak Meichel Sumarauw (43 Tahun), selaku Staf/Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa yang menyatakan :

“Peran akuntansi pertanggungjawaban yaitu masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya”

Peneliti menanyakan bagaimana akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 6: Ibu Regina Gloria Lumintang, SE (28 Tahun), selaku Staf/Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa yang menyatakan :

“Akuntansi pertanggungjawaban memiliki peran yaitu dapat menunjukkan jika terjadi penyimpangan biaya”

Peneliti menanyakan bagaimana akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 7: Ibu Heydi Sumanti Mantouw (34 Tahun), selaku Staf/Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa yang menyatakan :

“Memberikan informasi bagaimana kegiatan dari tiap pusat pertanggungjawaban”

Peneliti menanyakan bagaimana akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa? Menurut Informan 8: Bapak Miky Kumontoy (45 Tahun), selaku Seksi Tenaga Teknis SMP yang menyatakan :

“Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban dapat memberikan gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan akuntansi pertanggungjawaban di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa sudah cukup baik. Dengan adanya akuntansi akuntansi pertanggungjawaban masing-masing bidang dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya jika terjadi penyimpangan biaya serta dijadikan penilaian kinerja pada setiap unit kerja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis didapati biaya yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa adalah salah satu pusat pertanggungjawaban dari pemerintah daerah. Akuntansi pertanggungjawaban berperan sebagai alat pengendalian biaya. Dilihat dari struktur organisasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa tiap bagian-bagian kerja sudah jelas akan tanggung jawab dan wewenang yang ada dan sudah melakukan tugas dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan membandingkan antara teori-teori yang ada dengan data-data yang di dapati Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum cukup memadai. Dilihat dari:

### **Struktur organisasi**

Di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa menurut peraturan Bupati Minahasa no.44 tahun 2016 struktur organisasinya sudah menggambarkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas karena dalam struktur organisasinya memperlihatkan jenjang wewenang dan kedudukan dari atasan hingga bawahan. Struktur organisasi dinas pendidikan kabupaten minahasa terdiri dari kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi yang dibantu oleh sekretaris dan kepala jabatan fungsional. Kemudian jenjang dibawahnya terdiri dari kepala-kepala bidang yang membawahi beberapa subbidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. (Bapak Tommy Wuwungan S.Pd,MM (55 Tahun) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haq, 2018) struktur organisasinya terbagi dalam tingkatan wewenang dan tanggungjawab sehingga proses perencanaan efektif. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wandari & Sujana, 2021) terdapat struktur organisasi yang jelas menereapkan wewenang dan tanggungjawab tiap tingkatan manajemen.

### **Anggaran**

Dari hasil observasi yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan proses penyusunan anggaran mengikut sertakan partisipan unit-unit kerja di bidang masing-masing. (Bapak Tommy Wuwungan S.Pd, MM (55 Tahun) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa). Penelitian ini mendukung penelitian dari Haq, (2018) bahwa penyusunan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat melibatkan setiap bagian dalam penyusunan anggaran. Anggaran yang sudah ditetapkan tidak akan berubah lagi karena sudah ditetapkan dan setiap unit kerja dalam kantor yang melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan kantor. Kegiatan yang dilakukan masing-masing memiliki tatacara pengelolaan, apakah proses pencairan dana untuk kegiatan tersebut sesudah pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan tinggal dilihat dari anggaran yang sudah tertata. Tiap unit kerja yang

melakukan kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. (Bapak Ferry L.Tulung S.Pd 55 Tahun) selaku Kepala Subbagian Program Keuangan dan Pelaporan). Jika kantor memiliki sisa anggaran yang tidak terpakai akan dikembalikan ke kas daerah. (Bapak Wellem Debo Sakul (65 Tahun) selaku Bendahara Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa). Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Haq, (2018) yaitu dimana dalam penelitian tersebut sudah melibatkan partisipan unit-unit kerja dalam penyusunan anggaran.

#### **Sistem akuntansi**

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setiap bidang melaksanakan kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban untuk dilaporkan dibidang keuangan dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk pembuktian pelaksanaan kegiatan. (Bapak Ferry L.Tulung S.Pd (55 Tahun) selaku Kepala Subbagian Program Keuangan dan Pelaporan). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haq, (2018) juga menyebutkan bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus membuat laporan pertanggungjawaban untuk diolah dibagian keuangan kemudian dilaporkan ke pimpinan sebagai bukti transaksi pelaksanaan kegiatan.

#### **Penggolongan biaya**

Maka dari itu Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dikatakan belum cukup memadai karena belum memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali. (Bapak Ferry L.Tulung S.Pd (55 Tahun) selaku Kepala Subbagian Program Keuangan dan Pelaporan). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri, (2020) yaitu dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Dinas PU Kabupaten Enrekang tidak memisahkan biaya terkendali dan tidak terkendali. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syafi'i, 2015) dimana perusahaan sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan cukup baik walaupun perusahaan belum memisahkan antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Yasit & Murniati, 2021) bahwa pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali belum bekerja dengan baik.

#### **Pusat Pertanggungjawaban**

Dari hasil observasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan merupakan salah satu pusat pertanggungjawaban dari pemerintahan Kabupaten Minahasa dan kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. (Bapak Tommy Wuwungan S.Pd,MM (55 Tahun) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis tentang akuntansi pertanggungjawaban pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, dapat di tarik kesimpulan, struktur organisasinya sudah berjalan dengan baik dimana masing-masing unit kerja sudah menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan berdasarkan peraturan Bupati Minahasa No.44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan. Sistem anggaran, penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa sudah cukup efektif karena melibatkan tiap-tiap unit kerja dalam pentusunan anggaran.

Sistem laporan pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa yaitu setiap bidang yang melaksanakan kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Tetapi belum dapat memenuhi konsep akuntansi pertanggungjawaban secara sempurna karena belum adanya pengklasifikasian antara biaya terkendali dan tidak terkendali.

Saran bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, yaitu perlu adanya pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali untuk memudahkan suatu instansi atau perusahaan dalam

pengendalian biaya dan apabila terjadi penyimpangan dapat dilihat siapa yang bertanggungjawab atas penyimpangan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, eliza farah. (2018). Pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajer pada dinas perranian dan ketahanan pangan di pasuruan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Dan, M., & Pengumpulan, I. (2013). *Daftar cocok Skala Daftar dan Tabel Angket*. 1–28.
- Dianti, R. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial pada PDAM Tirta Kencana Samarinda. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisanis Universitas Mulawarman Samarinda*, 4(12).
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1).
- Haq, S. (2018). *analisis akuntansi pertanggungjawaban keuangan pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi sulawesi barat*. 151(2), 10–17.
- Kiki Hardiyanti Danial, Firman Menne, S. S. (2020). *Analisis Sistem Pertanggung Jawaban Anggaran pada kantor Dinas energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan*. 6(002), 240–252.
- Lubis, R. H., & Ovami, D. C. (2020). pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik terhadap akuntansi pertanggungjawaban sektor publik serta dampaknya terhadap good governance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Sulastri. (2020). penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendalian anggaran pada dinas pekerjaan umum kabupaten enrekang. *akuntansi*, 8(5), 55.
- Suliyanto. (2017). Pelatihan Metode Pelatihan Kuantitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(2), 223–232.
- Syafi'i, I. (2015). *peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran organisasi sektor publik (studi kasus pada PDAM surya sembada kota surabaya)*.
- Tumbuan, R. (2013). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2027>
- Wandari, N. K. H. A., & Sujana, E. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada RSUD Kab Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(1), 713–722. <https://repo.undiksha.ac.id/4599/>
- Wijayani, aprilia rahma. (2014). pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya standar. *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang*, 1, 1–148.
- Yasit, M. A., & Murniati, W. (2021). *ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA KOPERASI UNIT DESA YOSOWILANGUN*. 43–55.